

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila, seharusnya rakyat memiliki peran utama dalam mengawasi jalannya pemerintahan, dan pemerintah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Definisi demokrasi Pancasila menurut Badan Pengkajian MPR RI (2018), Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menggarisbawahi bahwa setiap keputusan politik harus mencerminkan kehendak rakyat, bukan segelintir elit yang berkuasa (Soekarno, 1964). Demokrasi idealnya mengamanatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, menjamin bahwa suara setiap individu dihargai dan diakomodasi dalam kebijakan publik (Dahl, 1998).

Namun, terdapat beberapa laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan demokrasi di Indonesia alami penurunan. Penurunan kualitas dan partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat. Data tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kebebasan sipil, pluralisme, fungsi pemerintahan, dan rendahnya peran masyarakat dalam demokrasi. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan militer terhadap interaksi sosial dan media digital turut memberikan kontribusi pada penurunan kebebasan sipil di Indonesia (Maulana, 2022). Masyarakat sering kali

melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang terpusat dan hanya dapat dijalankan oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas formal (Anderson, 1983). Ketidaktahuan ini mengakibatkan kurangnya partisipasi publik dalam urusan politik dan sosial. Banyak warga merasa tidak memiliki suara atau pengaruh dalam menentukan arah kebijakan publik, sehingga mereka cenderung apatis atau bahkan takut untuk terlibat dalam aksi-aksi yang menuntut perubahan (Habermas, 1989).

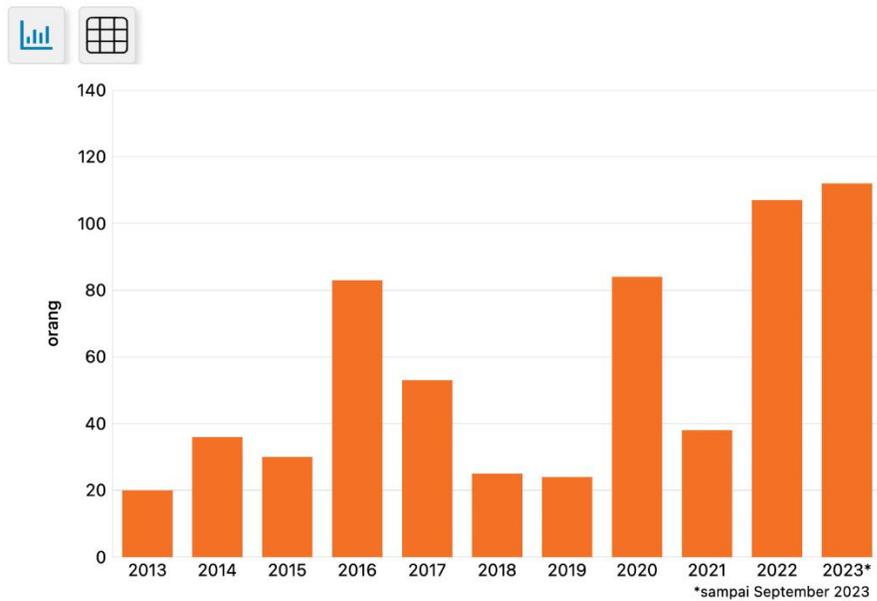
Sebuah penelitian dari Hadut (2024) mengungkap demokrasi Indonesia menghadirkan paradoks yang menarik, terutama dalam kaitannya dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya mencapai 75,6% pada Juni 2024. Namun, di balik angka tersebut, terdapat kritik signifikan terhadap gaya kepemimpinan yang dikenal sebagai "populisme teknokratis." Gaya kepemimpinan ini lebih menekankan pada keberhasilan pembangunan infrastruktur dan capaian ekonomi jangka pendek, namun sering kali dianggap mengabaikan nilai-nilai demokrasi substantif. Pendekatan ini dituding melemahkan oposisi politik, mempersempit ruang dialog publik yang konstruktif, serta mengurangi transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Penurunan indeks demokrasi Indonesia dan fenomena populisme tersebut menegaskan adanya tantangan serius dalam mempertahankan esensi demokrasi yang sebenarnya. Meskipun secara formal Indonesia masih dikategorikan sebagai negara demokrasi, keberadaan substansi demokrasi yang mencakup partisipasi aktif rakyat, kebebasan berekspresi, serta pengawasan efektif terhadap pemerintahan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian mendalam. Demokrasi tidak hanya sebatas prosedur pemilihan umum atau pencapaian pembangunan fisik, tetapi juga tentang memastikan bahwa rakyat memiliki akses dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan tanpa rasa intimidasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatur berbagai aspek dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk transaksi elektronik

dan perlindungan data. Namun, sejak diberlakukan, UU ITE telah menjadi topik kontroversial dan polemik di masyarakat. Salah satu alasan utama di balik polemik ini adalah karena UU ITE kerap kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk rezim yang berkuasa, untuk menekan dan membungkam kritik serta suara-suara yang berseberangan. Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti pasal terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering dijadikan alat untuk menuntut dan mengkriminalisasi individu-individu yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah atau pihak berwenang lainnya.

Penggunaan UU ITE dengan cara ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik terancam. Banyak aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang menjadi korban dari penafsiran dan penerapan yang dianggap sewenang-wenang dari undang-undang ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, polemik seputar UU ITE bukan hanya mengenai legalitas dan teknis hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan dan hubungan antara negara dan rakyat.

Menurut laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), selama periode 2013-2021 terdapat 393 orang dituntut dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

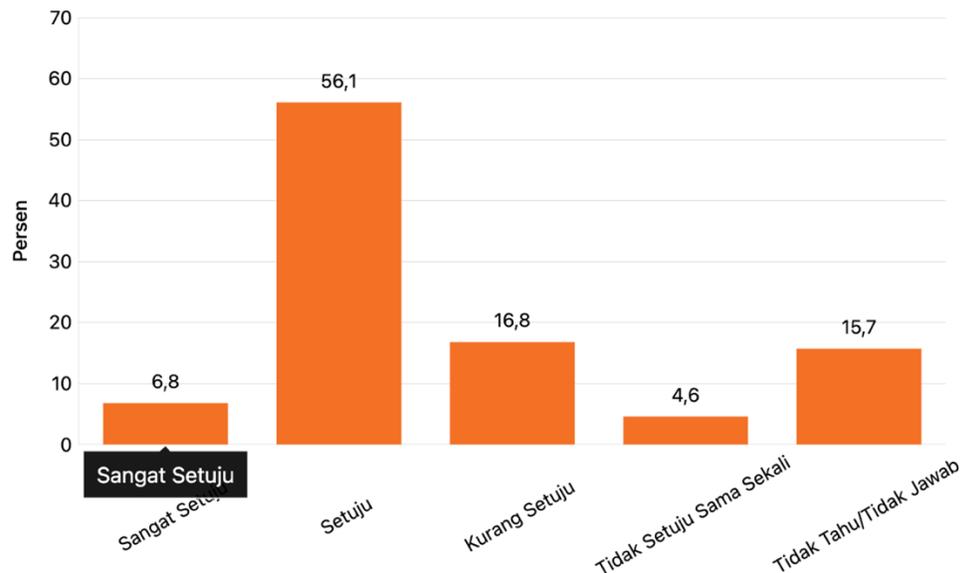


Gambar 1.1 Data Korban Kriminalisasi 1

Data terbaru SAFEnet selama Januari-September 2023, mencatat rekor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir dengan 112 individu terlapor/korban kriminalisasi ekspresi di Indonesia, melampaui angka pada tahun sebelumnya. Ini mencakup kasus-kasus seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penistaan agama, dan penyebaran berita palsu yang ditangani berdasarkan UU ITE dan KUHP (databoks, 2023).

Nama penting di pemerintahan era Presiden Jokowi juga ikut muncul dalam permasalahan ini, di mana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan dua orang aktivis yaitu, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 terkait hak berpendapat. Dilansir CNBC Indonesia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan Luhut ke Polda Metro Jaya setelah keduanya membahas konten dengan judul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!" yang tayang di kanal Youtube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 8 Juni 2023 lalu, Luhut pun mengaku tidak terima dianggap penjahat dan 'lord' oleh terdakwa Haris Azhar dalam unggahan akun Youtube tersebut.

Pada Maret tahun 2022, hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkap mayoritas atau 64,9% responden semakin takut untuk menyatakan pendapat.



Gambar 1.2 Hasil Survei IPI 1

Rinciannya, 6,8% responden sangat setuju, dan 56,1% responden setuju. Sementara itu, ada 21,4% responden yang tidak setuju bahwa masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya, dengan rincian 16,8% menyatakan kurang setuju dan 4,6% tidak setuju sama sekali. Sedangkan 15,7% menyatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab.

Puncaknya, dilaporkan oleh CNN Indonesia, pada tahun 2022 SETARA Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat skor mengenai hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia jadi yang terendah di tahun ini dibanding indikator pemajuan hak asasi manusia (HAM) yang lain. Indikator itu hanya memperoleh nilai 1,5 (CNN Indonesia, 2022). Skala pengukuran yang ditetapkan SETARA yakni dengan rentang nilai 1-7.

Dalam konteks demokrasi, ketika suara rakyat diabaikan, ini berarti pendapat, kebutuhan, dan aspirasi rakyat tidak didengarkan atau tidak dipertimbangkan dalam

proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi yang ideal, suara rakyat seharusnya menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan pemerintah (Dahl, 1998). Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, dikutip dari *The Diplomat*, kekuasaan politik kini terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit yang mendominasi pengambilan keputusan, dan media digunakan sebagai alat oleh politisi elit untuk mengontrol narasi publik. Hal ini mengakibatkan frustrasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan kelompok buruh, yang merasa hak-hak demokratis mereka terancam. Dia menyatakan bahwa demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan sejak Jokowi berkuasa, dan bahwa banyak institusi demokrasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilemahkan, sementara kebebasan berpendapat semakin dibatasi (*The Diplomat*, 2023).

Pendapat yang serupa juga diutarakan oleh Habermas (1989), ia menyatakan bahwa ketika demokrasi mengalami kemunduran, kekuasaan terkonsentrasi dan suara rakyat diabaikan, nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas mulai terkikis dan menjadi hanya sekadar formalitas tanpa substansi. Demokrasi yang sejati bukan hanya tentang adanya prosedur dan institusi, tetapi juga tentang keterlibatan nyata dan aktif dari rakyat dalam pemerintahan. Pembatasan dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meredam protes dan mengontrol arus informasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah seringkali menggunakan kekuasaannya untuk menekan suara-suara kritis dan menghambat distribusi informasi yang berpotensi menantang status quo.

Hal ini menciptakan iklim ketakutan di mana individu dan kelompok yang berani berbicara tentang ketidakadilan atau ketidakpuasan sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terlihat dari berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk mengontrol media dan platform digital. Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan pemblokiran situs web dan penyensoran konten yang dianggap merugikan atau berbahaya bagi stabilitas politik. Menurut Marway (2020), langkah-langkah ini tidak hanya

mengurangi ruang bagi diskusi publik yang sehat tetapi juga merusak demokrasi dengan menghalangi akses masyarakat terhadap informasi yang beragam dan kritis.

Serangkaian masalah di atas mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan antara pemerintah dan rakyat. Seharusnya, rakyat memiliki peran utama dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan bahwa pejabat publik menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang saat ini mengalami berbagai tantangan, peran partisipasi aktif masyarakat menjadi semakin krusial. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh kebebasan politik dan keadilan sosial, tetapi juga oleh keterlibatan aktif dan beragam dari seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu medium yang memiliki potensi besar dalam menggalang partisipasi publik adalah humor dan komedi. Humor dan komedi telah lama digunakan sebagai alat untuk mengkritik kekuasaan dominan dalam masyarakat sejak zaman Yunani Kuno. Kemudian pada abad ke-18 dan ke-19 terjadi perkembangan pada bentuk-bentuk baru seperti vaudeville di Amerika Serikat dan cabaret di Eropa, yang menjadi wadah bagi para komedian untuk mengkritik norma-norma sosial dan politik (Murray, 2010).

Sebagai bentuk seni yang terus berevolusi, humor dan komedi memasuki era baru dengan munculnya *stand-up comedy*. Transisi ini menggabungkan unsur-unsur tradisional vaudeville dan cabaret, membawa kesegaran dalam penyampaian humor yang lebih pribadi dan langsung. Mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan budaya dan sosial yang lebih kontemporer, di mana para komedian mulai merangkul format yang lebih langsung dan pribadi untuk mengungkapkan kritik sosial. Dalam konteks ini, *stand-up comedy* muncul sebagai ekspresi baru yang mengkombinasikan kecerdasan tradisional dengan keberanian untuk menanggapi isu-isu kontemporer, membuatnya relevan dengan audiens modern (Nesteroff, 2015).

Sedangkan *stand-up comedy* itu sendiri sebagai gaya baru komedi, muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat, berakar dari tradisi vaudeville dan klub malam. Bob Hope, salah satu pelopor *stand-up comedy*, membuka jalan bagi generasi berikutnya dengan gaya humor yang cepat dan cerdas (Nesteroff, 2015). Pada 1950-an

dan 1960-an, stand-up comedy menjadi platform penting bagi suara-suara baru seperti Lenny Bruce, yang menggunakan panggung untuk menantang isu-isu sosial dan politik. Seiring berjalannya waktu, stand-up comedy berkembang menjadi bentuk seni yang dihargai di seluruh dunia. Komedian-komedian seperti Chris Rock, Jerry Seinfeld, dan Joe Rogan menggabungkan humor dengan komentar sosial yang tajam. Di Inggris, komedian seperti Ricky Gervais dan John Bishop juga turut mengembangkan stand-up comedy dengan gaya dan tradisi mereka sendiri.

Lahirnya *stand-up comedy* di Indonesia juga menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap suatu kejadian tanpa melukai pihak-pihak yang terlibat. Gagasan, ide, dan ketidakpuasan yang diungkapkan melalui *stand-up comedy* lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena disajikan dengan bahasa yang santai dan sedikit humor (Susas, 2020). Karena penyampaiannya yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat, *stand-up comedy* menjadi sebuah wadah yang kuat untuk menyuarakan aspirasi, memperdebatkan isu-isu sosial, dan bahkan menjadi *platform* untuk komunikasi politik yang efektif. Dengan gaya yang santai dan informal, para komika mampu menyampaikan gagasan-gagasan kompleks dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh khalayak umum.

Stand-up comedy memiliki beberapa genre yang telah diidentifikasi mencerminkan keragaman pendekatan dan fokus materi komika. Terbagi atas genre *Observational Comedy*, *Absurd Comedy*, *Satirical Comedy*, hingga *Political/Social Commentary Comedy* yang melibatkan penggunaan panggung sebagai wadah untuk menyuarakan pendapat komika tentang isu-isu sosial dan politik. Salah satu komika yang terkenal dengan kemampuan mereka menyampaikan kritik sosial melalui humor yang tajam adalah Pandji Pragiwaksono.

Sebagai bagian dari fenomena ini, Pandji adalah komika yang memiliki dampak besar dalam industri *stand-up comedy* secara keseluruhan. Kehadirannya telah membawa *stand-up comedy* ke tingkat yang lebih serius dan diakui secara luas sebagai bagian penting dalam budaya populer Indonesia. Tidak hanya itu, Pandji Pragiwaksono juga aktif dalam memberikan pendidikan dan pengajaran tentang *stand-up comedy*.

Melalui seminar, workshop, dan pengajaran, dia telah membantu memperluas cakupan *stand-up comedy* di Indonesia dan mendorong pertumbuhan komunitas *stand-up comedy* yang lebih besar. Pemaparan di atas juga didukung oleh rekam jejak karirnya di industri hiburan yang pernah menjadi Seorang aktor, pembawa acara, penyiar radio, penulis, rapper, youtuber, dan sutradara.

Sejumlah topik dia bawakan pada pertunjukannya, dari mulai topik yang hadir dari keresahan sehari-hari, hingga topik soal dinamika sosial dan politik selalu konsisten dibawakan. Pada akhirnya sulit untuk menjauhkan *stand-up* Pandji dari kesan dan nuansa politik, karena faktanya Pandji sudah berkiprah di dunia politik sejak 2017. Pada saat itu, Pandji berhasil menginisiasi sebuah program televisi yang berfokus pada aspek politik yang disiarkan melalui saluran Metro TV. Pandji dalam bukunya yang berjudul “Septictank” menyatakan bahwa dia mengetahui secara langsung seberapa bising dan liarnya proses berpolitik di Indonesia. Semua kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Indonesia dihasilkan dari proses berpolitik, Pandji berharap masyarakat bisa berpandangan dan mengambil sikap politik, karena sesungguhnya politik sangat berdampak pada sendi-sendi kehidupan. Menurutnya boleh untuk tidak terjun ke dunia politik tapi jangan sampai kita tidak peduli dengan politik (Pragiwaksono, 2019).

Stand up comedy sering kali dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif yang memberikan ruang bagi beragam pendapat, namun adanya tekanan dari berbagai pihak terhadap materi-materi yang dianggap sensitif politis menunjukkan adanya ancaman terhadap kebebasan berpendapat dalam konteks ini. Mengingat, indeks kebebasan berpendapat serta berekspresi yang terjadi dalam satu dekade terakhir sangatlah rendah.

Namun, di tengah situasi itu, Pandji Pragiwaksono konsisten menjadi salah satu komika yang berani dalam mengemukakan pendapatnya. Dengan sikap yang tegas dan tanpa kompromi, Pandji tidak hanya menjadikan *stand-up comedy* sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai alat untuk menyuarakan pandangan-pandangan yang kadang-kadang kontroversial, memperjuangkan hak kebebasan berpendapat dalam konteks politik yang semakin keras.

Tidak jarang, pandangan kritis yang disampaikan melalui materi *stand-upnya* kepada penonton telah mengundang kontroversi berulang kali, lantaran lelucon-leluconnya yang sebenarnya merujuk pada kritik pada keadaan sosial dan politik. Contohnya adalah lelucon tentang penggunaan toa masjid, di mana ia menggambarkan bahwa toa masjid seringkali dimanfaatkan tidak sesuai dengan fungsinya, seperti untuk pengumuman yang seharusnya ditujukan pada ibu-ibu atau anak-anak yang sedang belajar mengaji namun belum mampu menggunakan mikrofon dengan baik di dalam masjid atau mushola. Di samping itu, terdapat konflik dengan komunitas pecinta kucing karena diklaim mendukung tindakan kekerasan terhadap hewan, meskipun inti dari lelucon tersebut sebenarnya adalah untuk menyoroti perilaku yang menindas hewan. Lebih lanjut, Pandji terlibat dalam pertikaian dengan komunitas penyandang disabilitas pendengaran, dengan dituduh merendahkan profesi Juru Bahasa Isyarat, walaupun maksudnya sebenarnya adalah untuk mengkritisi individu yang tidak memahami peran seorang Juru Bahasa Isyarat dan mencoba berperan sebagai Juru Bahasa Isyarat tanpa memiliki kualifikasi yang memadai.

Meskipun ditemui dengan berbagai tekanan dan kritik, Pandji terus mempertahankan gayanya sebagai komika yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pandangan kritis terhadap realitas sosial dan politik yang ada. Dengan demikian, keberanian Pandji menjadi sorotan positif dalam konteks benturan antara fenomena stand up comedy dalam politik dan hak kebebasan berpendapat yang semakin lemah, menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah nilai yang harus dijaga dan dipertahankan di tengah-tengah perkembangan dinamika sosial dan politik yang terus berubah.

Terbaru, Pandji menampilkan pertunjukan *stand-up comedy* di acara ‘3 Bacapres Bicara Gagasan’ yang diselenggarakan oleh Narasi pada 19 Sep 2023, di Universitas Gajah Mada. Pertunjukannya disiarkan secara langsung di kanal youtube Narasi TV. Pandji membawakan sebuah materi *stand-up comedy* yang membahas tentang Kabinet Presiden Jokowi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Siaran langsung tersebut sudah disaksikan oleh 7,3 juta

penonton. Lalu, pada kanal Pandji Pragiwaksono potongan video *stand-upnya* yang berdurasi 13 menit 52 detik itu sudah disaksikan oleh 1,5 juta penonton. Video tersebut disukai oleh 38 ribu orang, dan mengundang 2.829 orang untuk berkomentar.

Menurut Comika Media (2024), penampilan Pandji di Mata Najwa on Stage Yogyakarta (19/09/2023) yang Pandji beri judul **“Mulut Pandji Mata Najwa”** itu memang tak sampai 15 menit durasinya, namun Pandji sukses menyebut nama-nama penting tanpa tedeng aling-aling. Pandji membuka set dengan kalimat 'Saya di sini mau ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan' alih-alih salam, baik yang agamais atau pun nasionalis.

Berikut sejumlah komentar dari penonton ada di video tersebut:

Gambar x.x Komentar netizen pada video *stand-up comedy* Pandji



@hendifirmansyah8654 5 bulan yang lalu

Tidak ada sensor, tidak ada pembelokan nama / instansi, on point keresahannya, materi dan pemilihan kata yg mudah dipahami.. Mantaap, gk salah saya selalu mampir channel Lu Bang, buat tau dan update wawasan politik sosial dan kondisi negara dari perspektif Lu..



@Pujiyanto1015 5 bulan yang lalu

Gak nyebut wakanada atau konoha, langsung clear nama2 menteri dan presiden dengan jelas!! Wooohooo!!!
Siapa lagi yang bisa?
Good job! Terima kasih mensuarakan dengan jelas dan gamblang, Nji.



@gustingurah4079 5 bulan yang lalu

Indonesia butuh banyak manusia spt ini, jaga aset sdm spt ini. Semoga kedepannya lebih banyak lagi orang² yg berani bersuara lewat karya ❤️



@berrywibsal 5 bulan yang lalu

Fakkk!!!, tajem, keren, dah ga tau malu bilang apa lagi, terimakasih mas pandji mewakili banyak suara rakyat indonesia.



@sikopang7871 5 bulan yang lalu

Di saat yg lain masih bersembunyi dibalik "komedi pinggir jurang"... bang panji langsung terjun ke dasar jurangnya.



@hugoprakoso6628 5 bulan yang lalu

TERIMA KASIH SUDAH KELUARKAN SEMUA KERESAHAN DAN KEGELISAHAN KAMI SEBAGAI RAKYAT KECIL YG CUMAN BISA NONTON DRAMA KAUM PEJABAT RAKUS....BRAVO BANG PANJI



@farizyansama9308 5 bulan yang lalu

Ini kritik yang sangat tajam. Ga da sungkan2nya. Kl istilah jawa tanpa tedeng aling2. Luar biasa Bang Panji. Mulai saat ini anda-lah Lordnya. Tak peduli siapa yang dibelakang anda. Hormat untuk anda Lord Panji.

Gambar 1.3 Tangkapan Layar Komentar 1

Kolom komentar video tersebut didominasi oleh komentar yang menganggap Pandji adalah seseorang yang sangat berani, tajam, *to the point*, sosok yang mewakili keresahan rakyat, dan ucapan terima kasih. Dilansir juga dari (viva.co.id, 2023) video tersebut langsung ramai dikomentari netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyebut sosok Pandji cukup berani lantaran tak ragu menyebut sosok Luhut Pandjaitan secara terang-terangan. Menurut (Comika Media, 2023) Tampilnya Pandji Pragiwaksono di tengah-tengah acara tersebut tentu memberikan perspektif yang kontroversial, tetapi juga menciptakan ruang diskusi yang penting tentang peran dan keputusan di balik dominasi Luhut Binsar Pandjaitan serta dinamika politik di Indonesia.

Meskipun pandangannya dapat memicu perdebatan, hal ini adalah bagian dari kebebasan ekspresi dan berbicara dalam sebuah demokrasi, yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan. Demokrasi yang sehat menurut Dahl (1998) memerlukan partisipasi aktif dan beragam dari masyarakat, termasuk melalui medium budaya seperti *stand-up comedy* sekalipun.

Dalam konteks teori kekuasaan Michel Foucault, partisipasi aktif masyarakat seperti ini adalah wujud di mana kekuasaan itu tidak seharusnya dimonopoli oleh satu entitas atau kelompok tertentu, tetapi tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif, dan dapat ditemukan dalam setiap interaksi sosial. Kekuasaan menurut Foucault tidak hanya ada di tangan pemerintah atau elit politik, tetapi juga tersebar di antara individu-individu dalam masyarakat (Foucault, 1977).

Menurut Foucault dalam bukunya *The History of Sexuality* (1978) setiap individu memiliki potensi untuk menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi perubahan sosial. Kekuasaan ada dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil

sehari-hari, dari cara kita berbicara, berinteraksi, hingga bagaimana kita mendefinisikan dan mengatur ruang sosial di sekitar kita. Michel Foucault dalam teorinya menegaskan bahwa kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan timbal balik yang saling membentuk. Kuasa tidak hanya beroperasi melalui lembaga formal seperti pemerintah, tetapi juga melalui representasi simbolik di dalam masyarakat (Foucault, 1977). Dalam interaksi sosial, kuasa sering kali terwujud melalui simbol yang merepresentasikan otoritas tertentu. Sebagai contoh, hubungan antara dosen dan mahasiswa mencerminkan kuasa yang dimiliki oleh dosen, di mana posisi dan simbol otoritas seorang dosen memungkinkan mereka untuk memberikan instruksi yang hampir pasti diikuti oleh mahasiswa. Dalam konteks ini, simbol otoritas berperan dalam menciptakan relasi kuasa yang diinternalisasi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Foucault juga memperkenalkan konsep episteme sebagai bentuk pengetahuan otoritatif yang mendasari cara pandang masyarakat pada periode tertentu. Episteme tidak hanya menetapkan batasan antara apa yang dianggap benar dan salah, tetapi juga membentuk kerangka pemahaman kolektif tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin dipikirkan dan dilakukan (Smart, 2002). Pengetahuan dalam konteks kekuasaan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan dibentuk oleh intensitas penyebaran melalui media, literatur, dan praktik sosial yang terus menerus diperkuat (Foucault, 1980).

Apa yang telah lama dan konsisten dilakukan Pandji Pragiwaksono dalam bersuara dan mempengaruhi seseorang hingga saat ini, membawa peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana kuasa pengetahuan Pandji Pragiwaksono kepada audiensnya dalam medium *stand-up comedy*.

Maka, fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber semiotik yang terkandung dalam *stand-up comedy*, yang menunjukkan Kuasa Pengetahuan Pandji Pragiwaksono. Pertanyaan ini dilandasi dari kekhasan konsep kekuasaan dari Michel Foucault tentang kekuasaan adalah merupakan sesuatu yang lebih dilaksanakan daripada dimiliki. Kekuasaan, dalam pandangan Foucault, tidak melekat pada individu

atau kelompok tertentu, melainkan tersebar dan menyatu dalam berbagai praktek sosial. Konsep ini memungkinkan para peneliti untuk membongkar dominasi dan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat, melihat bagaimana kekuasaan beroperasi di berbagai tingkat dan aspek kehidupan sehari-hari. Foucault berpandangan bahwa kekuasaan juga produktif, membentuk pengetahuan, subjek, dan norma-norma sosial.

Pendekatan Foucault ini membuka ruang bagi penelitian yang mendalam mengenai bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai konteks sosial dan historis. Dengan memahami bahwa kekuasaan tidak dimiliki tetapi dilaksanakan, peneliti dapat mengidentifikasi praktik-praktik dan institusi-institusi yang berperan dalam menjaga dan mereproduksi relasi kekuasaan. Konsep kekuasaan Foucault ini memungkinkan peneliti untuk membongkar Pandji yang dalam konteks ini sebagai seorang komedian tidak hanya menyampaikan kritik terhadap figur atau kebijakan pemerintahan, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam praktik diskursif yang membentuk dan mempengaruhi persepsi publik terhadap konsep kekuasaan. Selain itu, penelitian ini juga diharap bisa menginspirasi munculnya lebih banyak individu yang berani bersuara melalui berbagai bidang mereka masing-masing. Pandji menunjukkan bahwa komentar sosial dan politik yang berdampak dapat berasal dari berbagai bidang masyarakat, bukan hanya dari ranah politik atau akademis tradisional. Dengan mengeksplorasi bagaimana dia mencapai platform dan pengaruhnya, penelitian ini berharap dapat mendorong orang lain untuk menggunakan bakat dan platform mereka sendiri untuk mengadvokasi perubahan.

Fokus penelitian yang disebutkan sebelumnya juga lahir karena sebuah paradigma kritis yang membantu peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian ini. Paradigma kritis memberikan landasan bagi peneliti untuk membongkar, memahami, mengkonstruksi, dan melakukan transformasi sosial politik. Paradigma ini merupakan bagian dari reflektivisme dan bertujuan menyelesaikan masalah sosial politik yang dikaji oleh peneliti, mirip dengan teori pemecahan masalah (*problem-solving theory*) (Bronner, 2011).

Kemudian untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, peneliti menggunakan Analisis semiotika sosial sebagai metode analisis yang dianggap sesuai dan relevan, karena memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap bagaimana sumber-sumber semiotik digunakan untuk menghasilkan artefak komunikasi dan peristiwa komunikasi, serta bagaimana hal tersebut diinterpretasikan dalam konteks sosial yang spesifik. Menurut Theo Van Leeuwen, semiotika sosial merupakan metode untuk mempelajari berbagai sumber daya semiotik yang digunakan dalam proses komunikasi. Dalam perspektif ini, komunikasi dipandang sebagai suatu proses di mana objek dimanipulasi, dan tanda-tanda yang dihasilkan dari manipulasi tersebut berfungsi sebagai simbol-simbol untuk berkomunikasi. Dalam semiotika sosial, sumber-sumber semiotik tidak hanya dianalisis maknanya, tetapi juga bagaimana sumber-sumber tersebut dimanfaatkan dalam konteks komunikasi (Leeuwen, 2005)

Leeuwen dalam pendekatan semiotika sosialnya mengidentifikasi empat dimensi utama: *discourse*, *genre*, *style*, dan *modality*. Berikut penjelasan masing-masing dimensi: 1) *Discourse* memungkinkan peneliti menggali struktur dan pola wacana yang digunakan dalam teks atau komunikasi. 2) *Genre* memungkinkan peneliti mengidentifikasi kategori atau jenis teks atau komunikasi yang mengikuti konvensi tertentu. 3) *Style* memungkinkan peneliti mengidentifikasi cara atau gaya spesifik yang digunakan untuk menyampaikan pesan. 4) *Modality* memungkinkan peneliti menggali tingkat "keaslian" atau "kenyataan" yang diberikan pada representasi (Leeuwen, 2005). Dari 4 dimensi semiotika sosial ini jugalah, yang akan peneliti konversikan menjadi 4 pertanyaan dalam penelitian. Peneliti berharap mampu memahami berbagai sumber semiotik yang terlibat dalam pertunjukan *stand-up comedy* Pandji, yang tidak hanya terbatas pada aspek verbal seperti kata-kata yang diucapkan, namun lainnya yang mungkin menyampaikan makna terkait Kuasa Pengetahuan.

Beberapa penelitian terdahulu yang bertema kekuasaan atau relasi kuasa yang berjudul "*Becoming and being a camp counsellor: discourse, power relations and emotions*" oleh Tenghua You (2023) mengeksplorasi pengalaman konselor kamp musim panas dan tuntutan emosional yang mereka hadapi. Tujuannya adalah

memahami dampak tuntutan emosional dan relasi kekuasaan terhadap kesejahteraan emosional konselor kamp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana dan relasi kekuasaan secara kritis membentuk pengalaman konselor kamp, dan tuntutan emosional yang berat dapat menyebabkan kerusakan mental dan fisik. Disarankan adanya praktik manajemen reflektif untuk mendukung kesejahteraan emosional konselor kamp.

Penelitian berjudul "*Shooting your voice': challenging power relations at school through Photovoice*" oleh Avy Dwight Hemy dan Assaf Meshulam (2022) menggunakan metode Photovoice untuk menantang relasi kekuasaan di sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri siswa serta kemampuan mereka untuk berdialog dengan administrasi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri dan harga diri siswa, meskipun mereka tetap skeptis mengenai kemampuan mereka untuk mengubah relasi kekuasaan secara signifikan.

Kemudian penelitian dari Setiyoko & Baskoro (2020) bertujuan untuk mengungkap struktur kekuasaan serta mengidentifikasi ideologi yang tercermin dari penggunaan bahasa oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam membangun representasi kelompok anarko-sindikalis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pihak kepolisian digunakan secara sepihak untuk merepresentasikan kelompok tersebut. Kekuasaan ini juga dimanfaatkan untuk menanamkan stigma tertentu kepada kelompok anarko-sindikalis, seperti menggambarkan mereka sebagai perusuh, kelompok yang menunggangi demonstrasi, melakukan kerusakan terhadap fasilitas, dan melakukan kekerasan terhadap petugas kepolisian.

Ondrej Kascak (2022) dalam penelitiannya berjudul "*Test culture from a 'new economy of power relations' perspective*" menganalisis efek budaya tes nasional pada aktor tes di Slovakia dengan menggunakan teori Foucault tentang 'ekonomi baru dari relasi kekuasaan'. Tujuannya adalah memahami kompleksitas respons sosial terhadap

budaya tes normatif di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah merespons tekanan normatif dengan berbagai cara, termasuk strategi resistensi yang mengarah pada pembentukan anti-struktur.

Ayelet Prior dan Einat Peled (2022) dalam penelitiannya berjudul "*Gendered power relations in women-to-men interviews on controversial sexual behavior*" mengeksplorasi relasi kekuasaan berjeniskan gender dalam studi perilaku seksual yang distigmatisasi. Tujuannya adalah memperluas literatur metodologis tentang dampak aspek gender dan relasi kekuasaan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dinamika relasi kekuasaan yang kompleks dalam wawancara wanita-ke-pria, dengan intimidasi emosional dan kekhawatiran narasumber tentang stigma sebagai penyimpang seksual.

Penelitian berjudul "*Politics at the table: food and power relations at the 1935 Brussels International Exposition*" oleh Nelleke Teughels (2021) mengeksplorasi makna semiotik dalam pemilihan dan representasi makanan di Pameran Internasional Brussel 1935. Tujuannya adalah menyelidiki bagaimana makanan digunakan oleh elit penyelenggara sebagai instrumen yang dipolitisasi untuk ekspresi budaya dan diplomasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan digunakan sebagai alat untuk menciptakan goodwill lintas budaya, memperkuat hubungan perdagangan, dan membangun identitas nasional. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bagaimana berbagai dinamika kekuasaan dan agensi individu beroperasi dalam konteks sosial dan budaya yang beragam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan memiliki relevansi akademik yang kuat dan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kekuasaan dalam konteks yang unik. Secara keseluruhan, data di atas mendukung bahwa ada peluang yang baik untuk penelitian ini dilakukan, dan topik ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bidang studi kekuasaan, *stand-up comedy*, dan semiotika sosial.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penggunaan metode analisis semiotika sosial Van Leeuweun pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan sejumlah perumusan masalah yang mengacu pada 4 dimensi analisis semiotika sosial Van Leeuwen, yaitu:

1. Bagaimana wacana digunakan oleh Pandji Pragiwaksono untuk mengoperasikan kuasa pengetahuan pada *stand-up comedy* "Mulut Pandji Mata Najwa"?
2. Bagaimana karakteristik *stand-up comedy* Pandji Pragiwaksono dalam mengoperasikan kuasa pengetahuan pada *stand-up comedy* "Mulut Pandji Mata Najwa"?
3. Bagaimana gaya komunikasi Pandji Pragiwaksono dalam mengoperasikan kuasa pengetahuan pada *stand-up comedy* "Mulut Pandji Mata Najwa"?
4. Bagaimana jenis dan tingkat modalitas yang digunakan Pandji Pragiwaksono dalam mengoperasikan kuasa pengetahuan pada pertunjukan "Mulut Pandji Mata Najwa"?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Utamanya untuk mengkaji sumber-sumber semiotik yang terkandung dalam *stand up comedy*, yang menunjukkan Kuasa Pengetahuan Pandji Pragiwaksono.
2. Untuk mengetahui bagaimana wacana digunakan oleh Pandji Pragiwaksono untuk mengoperasikan kuasa pengetahuan pada *stand-up comedy* "Mulut Pandji Mata Najwa".
3. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik *stand-up comedy* Pandji Pragiwaksono dalam mengoperasikan kuasa pengetahuan pada *stand-up comedy* "Mulut Pandji Mata Najwa".

4. Untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi Pandji Pragiwaksono dalam mengoperasikan kuasa pengetahuan pada *stand-up comedy* "Mulut Pandji Mata Najwa".
5. Untuk mengetahui bagaimana jenis dan tingkat modalitas yang digunakan Pandji Pragiwaksono dalam mengoperasikan kuasa pengetahuan pada pertunjukan "Mulut Pandji Mata Najwa".

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi dan budaya dengan mengeksplorasi peran *stand-up comedy* sebagai alat perjuangan sosial dan politik di Indonesia.
2. Membuka dimensi baru dalam studi tentang kuasa, dengan menyoroti bagaimana kuasa dan pengetahuan bisa tercermin dalam pertunjukan seni, khususnya *stand-up comedy*.
3. Penguatan wacana politik melalui seni dan budaya dengan memperkaya diskusi tentang peran seni dan budaya dalam memperkuat demokrasi dan memberikan landasan teoritis bagi penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang penggunaan *stand-up comedy* media operasi kekuasaan dan pengetahuan.
2. Sebagai inspirasi bagi individu di masyarakat dengan menunjukkan bahwa kritik sosial dan politik dapat muncul dari berbagai bidang, mendorong individu lain untuk mengadvokasi perubahan.
3. Memperkuat partisipasi aktif masyarakat dengan memberikan contoh konkret bagaimana individu dapat memengaruhi publik ke arah yang positif dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi.

4. Sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan budaya dengan menyediakan dasar bagi kebijakan yang mendukung ekspresi kreatif dan partisipasi aktif dalam diskursus publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian karya ilmiah dari Bab I sampai Bab V.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: demokrasi yang sedang mengalami berbagai rintangan, Pandji Pragiwaksono yang menggunakan *stand-up comedy* sebagai sarana perlawanannya, alasan penelitian ini dilakukan, novelty penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemaparan teori dari Teori Kekuasaan Michel Foucault, Kuasa dan Pengetahuan, Diskursus, Semiotika Sosial, Teori Kritis, Paradigma Kritis, Stand-Up Comedy, Komunikasi Politik

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan kualitatif dalam penelitian, metode analisis semiotika sosial Van Leeuweun, subjek dan objek penelitian, paradigma penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini menguraikan bagaimana kuasa pengetahuan Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up comedy-nya. Dengan menggunakan metode analisis semiotika sosial, materi stand-up comedy Pandji dianalisis untuk melihat bagaimana makna dibangun, disampaikan, dan diterima audiens. Sedangkan teori kuasa-pengetahuan Michel Foucault menjadi landasan teoritis utama dalam penelitian ini. Untuk membedah bagaimana komedi digunakan sebagai medium yang efektif dalam membentuk dan menyebarkan wacana-wacana sosial tertentu. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pandji, menggunakan *stand-up comedy* sebagai alat yang mempengaruhi persepsi dan pemahaman publik terhadap isu-isu tertentu, dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai figur publik.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.